

**SISTEM PENGENDALIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) SEMANGAT PEMUDA DESA GIRI SASAK**

Lia Susanti

Universitas Mataram
liasusnti23@gmail.com

Animah

Universitas Mataram
animahmtr@unram.ac.id

Lalu Takdir Jumaidi

Universitas Mataram
takdirjumaidi@unram.ac.id

Abstract: *This study aims to reveal the internal control system for providing credit and handling bad credit problems at the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Spirit of the Giri Sasak Village Youth. The research method used in this research is qualitative with a descriptive approach. This study uses data collection techniques in the form of: in-depth interviews, conservative observation, documentation and literature study. The results of this study indicate that the credit distribution control system and handling of bad credit problems BUMDes Spirit of Youth in Giri Sasak Village is still inadequate or there are still deficiencies seen from wrong credit analysis and bankruptcy, so that the effort taken is to continue to collect. This research still requires discipline from BUMDes employees in carrying out applicable credit policies or regulations as well as a firm attitude and further actions related to handling bad loans. This research assumes for credit management to improve the process of granting credit and handling problems related to bad loans in improving the internal control system that is more adequate for BUMDes.*

Keywords: *BUMDes, Credit, Internal Control, System*

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah kelompok usaha yang dijalankan oleh masyarakat daerah dan orang-orang yang menjalankan usaha tersebut dalam rangka meningkatkan perekonomian desa. Sejumlah dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah meletakkan dasar bagi pengembangan BUMDes. “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa” merupakan pernyataan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilandaskan pada Pasal 213 Ayat 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pengendalian intern adalah suatu kebijakan atau prosedur yang secara langsung atau tidak langsung dapat meminimalkan kecurangan atau penyimpangan yang dapat merugikan suatu perusahaan. Pengendalian internal yang efektif terutama ditujukan untuk melindungi aset organisasi dengan meminimalkan potensi penipuan, piutang tak tertagih, dan kredit bermasalah.

Salah satu bidang usaha yang dilakukan BUMDes Semangat Pemuda yaitu melakukan kegiatan jual beli sembako secara kredit sebagai bentuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan desa. BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak bekerja sama dengan Mahadesa TDC sebagai mitra kerja. Mahadesa TDC (*Trade and Distribution Center*) merupakan usaha bisnis yang diluncurkan oleh PT. GNE untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus keluar rumah. PT. GNE telah mengembangkan sistem bisnis dalam program Mahadesa yang menggunakan seluruh BUMDes sebagai perpanjangan tangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing setiap kebutuhan rumah tangga, seperti : Sabun, minyak, goreng, beras, dan sejenisnya yang ada di katalog merupakan contoh kebutuhan pokok rumah tangga. Namun, BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak menghadapi berbagai masalah, salah satunya yaitu terjadi kredit macet.

Kredit macet berdampak negatif pada BUMDes “Semangat Pemuda” Desa Giri Sasak. Adanya piutang yang jatuh tempo menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung oleh BUMDes terhadap ketidakpastian pengembalian piutang dari SPV (Reseller). Kredit macet yang terjadi pada BUMDes Semangat Pemuda selama 2 tahun berjalan yaitu mulai pada bulan Desember tahun 2020 terbilang cukup fantastis dengan kisaran ratusan juta. Hal ini diindikasikan oleh beberapa faktor misalnya, kebiasaan masyarakat yang menunggak bayar, pengakuan masyarakat terkait dengan pelunasan utang namun tidak sesuai dengan pencatatan yang ada di Mahadesa TDC, staff BUMDes yang bertugas sebagai operator sistem bisa dikatakan sering absen dengan alasan sakit, ketua BUMDes selaku pengawas tidak melakukan kontrol yang ketat saat operasional berlangsung dan beberapa faktor lain.

Data piutang SPV BUMDes Semangat Pemuda Desa Gri Sasak

Dusun	SPV	Grup	Umur Piutang	Total Kredit
Buntage	Muhammad Sapi'i	Semangka 1	121 Hari	17.776.372
Lendang Sedi	Marianti	Mangga 2	85 Hari	15.291.764
Lendang Sedi	Novita Hariyani	Teratai 1	103 Hari	19.073.572
Perendekan S	Siti Zakrah	Mawar 1	85 Hari	16.782.892
Perendekan S	Sri Langgawati	Beringin 1	111 Hari	51.875.351
Perendekan U	Sahni	Melati 1	108 Hari	9.326.052
Tanak Potek	Kalsah	Pisang 1	77 Hari	13.210.999
Tanak Potek	Muni'am	Apel 1	84 Hari	30.080.526
Total				173.417.528

Sumber : BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak 31 Mei 2021

BUMDes Semangat Pemuda membutuhkan pengawasan yang baik secara internal maupun eksternal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik keuangan oleh berbagai pihak yang dapat mempengaruhi kesehatan BUMDes. Untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah dan kredit macet, perlu dilakukan pengendalian internal kredit dengan tujuan untuk menjaga kemakmuran organisasi, memverifikasi keakuratannya, dan meningkatkan efisiensi guna memenuhinketentuan yang berlaku. Dalam melakukan pemberian kredit, BUMDes haruslah menganut prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang akan memungkinkan memberikan dampak resiko yang besar.

Di antara hal-hal yang menurut Maruta (2015) yang akan dicapai oleh sistem pengendalian internal dalam arti sempit diantaranya: (a) mengumpulkan data dari berbagai informasi, seperti sumber daya manusia, keuangan dan hukum, (b) meningkatkan akurasi pengumpulan data, (c) meningkatkan efektivitas kebijakan perusahaan, dan (d) meningkatkan produktivitas operasional perusahaan. pentingnya melakukan penelitian ini karena sistem pengendalian kredit harus sesuai dengan pemberian syarat-syarat yang jelas dan ketentuan perjanjian kredit yang telah di tentukan sebelumnya dengan memberikan batas waktu satu bulan untuk melunasi piutang yang jatuh tempo agar tidak terjadinya kredit macet. Akibatnya, untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah maka dibutuhkan sistem pengendalian intern sebagai fungsi pengaruh dan pengendali dari sistem tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori (Bold)

2.1.1 Stewardship Theory

Grand Theory yang mendasari penelitian ini adalah teori Stewardship. Menurut Donaldson & Davis (1999), teori Stewardship adalah suatu keadaan dimana tujuan utama manajemen bukanlah tujuan individu, melainkan kepentingan organisasi. Teori Stewardship menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara kepuasan dan keberhasilan perusahaan. Adanya kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) atas dasar kepercayaan dalam mencapai tujuan organisasi.

2.1.2 Implikasi Teori terhadap Penelitian

Sewards dalam penelitian ini adalah pengelola BUMDes untuk kepentingan principal masyarakat luas dan pemerintah desa setempat. Namun, teori *Stewardship* dapat menjadikan pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintah yang akan bekerja dan berperilaku sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan pengelola mampu melakukan tugasnya dengan tepat sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih percaya dan yakin akan tugas yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dan harapan kesejahteraan masyarakat juga semakin terjamin.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

Integrasi dua atau lebih komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu merupakan pengertian dari sistem pengendalian Hanif (2012, 2). Pengendalian internal, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen senior dan karyawan unit bisnis lainnya, memiliki tujuan di bidang keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasional serta memberikan jaminan pencapaian yang wajar. Oleh karena itu, pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi dan seluruh mekanisme serta peralatan yang dikelola secara bersama-sama untuk melindungi seluruh aset organisasi dari berbagai arah, Mawardiani (2017, 3). Dengan sistem pengendalian internal yang baik, maka suatu organisasi menghasilkan keuntungan dalam kegiatan bisnis.

Menurut Moeller (2014) pengendalian internal terdiri dari lima elemen yang saling berhubungan. Lima elemen pengendalian intern tersebut adalah ;

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah dasar dari semua komponen lain dari pengendalian internal yang terkendali dan terstruktur. Lingkungan pengendalian yang efektif menciptakan disiplin yang mendukung penilaian risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan, aktivitas pengendalian, penggunaan organisasi, pelaksanaan sistem komunikasi informasi dan kegiatan pemantauan..

2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Risiko merupakan suatu peristiwa yang terjadi, mempengaruhi pencapaian beberapa tujuan bisnis, dan dapat menimbulkan kerugian. Penilaian risiko adalah bagian dari proses mengidentifikasi dan menilai suatu risiko. Semua kegiatan bisnis membawa beberapa risiko dalam suatu perusahaan, sehingga tidak ada cara praktis untuk menghilangkannya. Manajemen harus hati-hati dalam menentukan jumlah risiko yang dapat ditoleransi dan berusaha mempertahankan risiko dalam batas yang ditentukan. Selain itu, penilaian risiko perlu mempertimbangkan dampak perubahan yang mungkin terjadi.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh kepemimpinan suatu organisasi untuk memastikan bahwa tanggapan perusahaan terhadap potensi risiko dan lainnya mampu menetapkan kode etik perusahaan, dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan Komunikasi ini tergolong mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai staf/karyawan. Tujuan dari pengendalian sistem informasi komunikasi adalah untuk menjelaskan jenis informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi dan bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan kepada berbagai pihak. Perusahaan perlu mengembangkan dan menyediakan informasi yang kompeten. Sistem informasi tersebut akan mencatat, memproses, menyimpan, dan melaporkan data.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah prosedur yang mengevaluasi kualitas kinerja staf/karyawan BUMDes baik secara internal selama jangka periode waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah masing-masing komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan informasi komunikasi telah dilaksanakan dengan baik.

2.1.4 Kredit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun (1998) kredit adalah suatu perjanjian atau kontrak pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, atau pemberian sejumlah uang yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Mendari & Widayati (2019) Pengertian Kredit menurut UU RI No.7 Bab 1 pasal 1 Ayat (12) Tahun 1992 tentang Perbankan adalah suatu perjanjian mengenai pemberian konsensual tagihan atau uang yang dapat dipersamakan dengan itu. Perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak ketiga yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya dengan jumlah bagi hasil atau bunga yang disepakati bersama setelah jangka waktu tertentu. Dari penjelasan di atas, bisa diimpulkan bahwa pinjaman didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak. Menurut Abdullah T & Wahjusaputri S (2018) unsur-unsur terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit terdiri dari : Kepercayaan, Kesepakatan, Jangka Waktu, Risiko, Balas Jasa.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat oleh Pirdaus (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di BUMDes Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat belum berfungsi secara efektif, seperti yang dapat dibuktikan dari hilangnya jaminan, bangkrut dan salah analisa kredit. Sehingga upaya yang dilakukan oleh BUMDes Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat adalah tagih terus.
2. Peran Pengendalian Intern dalam Mendukung Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri)

oleh Munawaroh (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh koperasi pegawai bank Rakyat Indonesia Kediri sudah berjalan efektif dan peran pengendalian intern dalam mendukung efektivitas pengkreditan tidak dapat diabaikan.

3. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Intern Dalam Proses Pemberian Kredit di Bpr Nusamba Ngunut – Cabang Ngadiluwih oleh Dwijayanti (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi dan pengendalian kredit internal pada BPR Nusamba Ngunut Cabang Ngadiluwih sebagaimana telah dilaksanakan sesuai kebijakan penyaluran kredit bank, sehingga telah tercapai dengan efisiensi dan efektivitas.
4. Analisa Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pemberian Pinjaman BNI Griya di BNI LNC Palembang oleh Nurmala (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal pemberian kredit di BNI LNC Palembang telah berjalan dengan baik, terbukti dengan hasil temuan-temuan dari ketatnya dalam menyelektif prosedur dalam meneliti dan menyeleksi calon nasabah/SPV.
5. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Pada BRI Kota Samarinda oleh Muzamil (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian kredit internal di BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda masih tidak dapat memenuhi kebutuhan fungsi tugas dan kebutuhan kepegawaian.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah jenis kerangka kerja tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai isu penting. Kajian ini menjawab pertanyaan bagaimana sistem pengelolaan piutang tak tertagih pada BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak. BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak merupakan lembaga ekonomi yang menyalurkan dana kepada Desa Giri Sasak dan masyarakat sekitarnya dalam sektor kredit mikro. Hingga saat ini BUMDes Semangat Pemuda telah menjalankan 1 unit usaha yaitu unit perdagangan. Bumdes bekerjasama dengan Mahadesa dengan menjual sembako secara kredit kemudian menyalurkan barangnya ke tangan pertama yang disebut sebagai SPV (reseller) dan terjadi masalah kredit macet dalam tempo yang terbilang cukup fantastis dengan kisaran utang ratusan juta, hal ini membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem

pengendalian kredit yang dilakukan oleh BUMDes Semangat pemuda dalam meminimalisir agar tidak terjadi kredit macet dengan memberikan sanksi terhadap nasabah/SPV yang melakukan piutang jatuh tempo.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini untuk memperjelas pilihan pendekatan secara mendalam menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan kata lain, metode penelitian yang mempelajari keadaan objek alam, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, kemudian data dikumpulkan menggunakan triangulasi, serta analisis data terbilang induktif. Hasil penelitian lebih mengutamakan makna daripada generalisasi Sugiyono (2021, 3). Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data dari sumber data pada bidang penelitian tertentu, dan metode deskripsi kualitatif digunakan dalam pengumpulan data ketika melakukan penelitian di lapangan dan melakukan studi kasus. Sehingga, cara ini akan digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem pengendalian kredit pada BUMDes.

agar lebih mudah penerapannya dalam mengambil suatu sumber data yang berada dilokasi penelitian yang bersifat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dirumusan masalah dan metode ini digunakan deskriptif kualitatif digunakan dalam mengambil data jika melakukan penelitian lapangan dan studi kasus. Metode ini akan digunakan untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian Kredit yang dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Pemuda Desa Giri sasak.

3.2 Desain Penelitian

Studi kasus merupakan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian Studi kasus bertujuan untuk fokus hanya pada satu fenomena yang dipilih, dengan mengabaikan yang lain, dan menyelidiki secara terperinci. Peneliti menggunakan desain penelitian ini agar memfokuskan pada satu fenomena, yaitu sistem pengendalian kredit yang bermasalah pada BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak. Peneliti ingin mengetahui lebih mendalam terkait Bagaimana sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak. Desain ini dipilih untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami selama proses sistem pengendalian kredit pada BUMDes Desa Giri Sasak.

3.3 Pengumpulan Data

Penelitian ini nantinya akan bertempat di BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak yang beralamatkan di Jln Giri Sasak, Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Narasumber terkait penelitian ini adalah pihak direktur dari BUMDes Semangat Pemuda sekaligus staf-staf atau karyawan yang bekerja disana. Direktur sebagai pihak pertama yang akan mengambil keputusan terkait masalah yang terjadi di BUMDes akan menjadi narasumber utama terkait penelitian ini. Selanjutnya narasumber lainnya yaitu terdiri dari Kepala Desa (Penasehat) staf BUMDes, SPV(Reseller), staf Mahadesa, dan konsumen.

Sumber data yang peneliti gunakan terbagi menjadi dua kelompok dalam penelitian ini diantaranya data Primer dan data sekunder. Data primer melakukan wawancara kepada informan, yaitu Ketua BUMDes, Bendahara Staff Bumdes, Kepala Desa, staff Mahadesa, Spv(Reseller), dan Konsumen. Sedangkan Data Sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan fenomena yang akan diteliti di BUMDes Desa Giri Sasak mengenai kredit macet yang bermasalah. Yang diperlukan dalam metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi secara mendalam terkait apa yang terjadi di BUMDes Semangat Pemuda, wawancara dengan informan yang terlibat, dan metode dokumentasi sebagai data tambahan.

3.4 Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2021, 32) Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai jenis dan berbagai pengelompokan. Pengelompokan triangulasi terbagi menjadi 3 bagian dalam keabsahan data diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam keabsahan data triangulasi sumber pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa jenis dan sumber. Kemudian data yang diperoleh akan dikelompokkan dengan cara menguraikannya sesuai dengan hasil yang telah diperoleh dan diteliti dari berbagai sumber sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Triangulasi sumber di Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Desa Giri Sasak dengan mengumpulkan data dari berbagai jenis, yaitu hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dengan teknik yang serupa dari informan penelitian.

Adapun triangulasi teknik dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan menentukan satu titik tertentu dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda. Contohnya seperti data diperoleh dengan wawancara dengan pihak BUMDes, kemudian melakukan pengecekan secara observasi, serta bukti dokumentasi sampai menemukan data yang sama, sesuai, relevan, dan akurat.

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses atau prosedur untuk mengubah data menjadi informasi baru, baik itu dari sumber-sumber hasil dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Setelah mendapatkan hasil tersebut kemudian peneliti melakukan pengelompokan data sesuai dengan jenis-jenisnya serta menyusun dan memilih data yang telah diolah agar peneliti dengan mudah melakukan penarikan kesimpulan Sugiyono (2021, 16). Terdapat 3 cara untuk menganalisis data dalam penelitian ini yang pertama, Reduksi Data, yang kedua Penyajian Data, dan yang ketiga Penarikan Kesimpulan. Data Reduksi, yaitu peneliti mengambil dan merangkum informasi yang telah diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data, yaitu penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga memudahkan peneliti memahami kondisi yang terjadi sebenarnya. Dan peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Giri Sasak merupakan salah satu dari sejumlah desa di wilayah Kecamatan Kuripan yang berada dalam jarak empat kilometer dari pemerintah daerah dan tujuh kilometer dari pemerintah provinsi. Desa Giri Sasak adalah tempat dimana masyarakat kuripan Selatan pertama kali menetap pada tahun 2010, dengan luas tptal 321,33 Ha. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Giri Sasak mulai dibentuk pada tahun 2014, yang dinamakan dengan BUMDesa “Semangat Pemuda”. Pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah Desa. BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak merupakan salah satu BUMDes di Desa Giri Sasak yang mempunyai unit usaha perdagangan. BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak merupakan lembaga ekonomi yang menyalurkan dana kepada masyarakat di Desa Giri Sasak dan sekitarnya yang tergolong dalam sektor kredit mikro. Bumdes bekerjasama dengan Mahadesa dengan menjual sembako secara kredit kemudian menyalurkan barangnya ke tangan

pertama yang disebut sebagai SPV (reseller). Penerapan sistem pengendalian internal dalam proses penyaluran kredit pada BUMDes berdasarkan 5 komponen internal dari Moeller (2014) meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi Komunikasi, dan Pemantauan.

a) Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian akan menekankan pada semua faktor yang secara bersamaan memengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian internal. Berdasarkan hasil penelitian lingkungan pengendalian yang diterapkan oleh BUMDes Semangat Pemuda terkait pemberian kredit diantaranya adalah integritas yang rendah, struktur organisasi, sumber daya manusia, BUMDes tidak menetapkan standar dalam pengelolaan kredit, dan terakhir tidak melakukan penagihan rutin kepada debitur.

1) Integritas dan nilai Etika

BUMDes Semangat Pemuda memiliki integritas yang rendah. Hal ini dilihat dari kurangnya dalam memenuhi peraturan-peraturan yang mengatur tentang etika dan perilaku yang harus diikuti oleh setiap karyawan. Selain itu, BUMDes Semangat Pemuda juga tidak memiliki kebijakan dan prosedur terkait pemberian kredit. Sehingga apabila terdapat pegawai yang tidak melaksanakan aturan tersebut sebaiknya diberi teguran berupa teguran secara lisan maupun tulisan. Struktur organisasi

2) Struktur organisasi

BUMDes Semangat Pemuda memiliki struktur organisasi yang jelas dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai. Misalnya dalam proses pemberian kredit, hanya pegawai yang berwenang yang dapat memberikan keputusan kredit. Namun Pegawai yang terlibat dalam proses pemberian kredit di BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak seperti staf BUMDes yang bertugas sebagai operator sistem bisa dikatakan sering absen dengan alasan sakit dan ketua BUMDes selaku pengawas tidak melakukan kontrol yang ketat saat operasional berlangsung.

3) Sumber daya manusia

BUMDes Semangat Pemuda memiliki kebijakan dan prosedur kepegawaian dengan tujuan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur dan berkompeten terhadap tugasnya untuk mendukung sistem pengendalian intern

yang efektif. Namun untuk meningkatkan kualitas pegawai BUMDes Semangat Pemuda tidak melakukan bimbingan secara langsung dari Direktur BUMDes dan tidak mengikuti workshop maupun seminar untuk meningkatkan kualitas pegawai BUMDes,

4) BUMDes menetapkan standar dalam pengelolaan kredit

BUMDes Semangat Pemuda tidak memiliki standar yang ditetapkan terkait pengelolaan kredit dalam upaya menekan angka kredit macet. Standar ini bertujuan agar dapat melakukan pengawasan secara internal dan kegiatan kredit dapat berjalan dengan baik. Kredit dikatakan macet dilihat dari klasifikasi batas kredit yang telah ditetapkan oleh BUMDes. Sehingga BUMDes Semangat Pemuda seharusnya menetapkan standar ini sebagai acuan untuk membuat kebijakan dan dapat mengelola kredit dengan maksimal.

5) Melakukan penagihan rutin kepada nasabah/SPV

Penagihan dilakukan dengan tujuan agar nasabah/SPV memprioritaskan pelunasan piutang yang jatuh tempo sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Dengan begitu, maka BUMDes dapat menekan risiko kredit macet. Meskipun telah dilakukan penagihan secara rutin bukan berarti tidak terdapat nasabah yang tidak membayar piutangn tepat waktu.

b) Penilaian Resiko (*risk assessment*)

BUMDes Semangat Pemuda juga menghadapi berbagai resiko salah satunya adalah resiko kredit macet. Untuk itu, penilaian resiko yang dilakukan BUMDes Semangat Pemuda yaitu dengan mengawasi kinerja pegawai yang terlibat dalam urusan piutang yang jatuh tempo. Melakukan kontrol agar angka kredit yang kurang sehat tidak terjadi peningkatan. Serta melakukan penagihan rutin sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam mengurangi resiko terjadinya kredit macet selain melakukan kontrol yang ketat diperlukan juga penanganan yang cepat yang tepat selama proses pembayaran kredit. Namun Direktur BUMDes Semangat Pemuda selaku pemimpin BUMDes terbilang tidak pernah melakukan pengecekan terhadap daftar nama calon nasabah/SPV yang akan memasuki jatuh tempo pembayaran kredit dan kemudian mengelompokkannya. Ketua BUMDes selaku direktur hanya melakukan pengecekan barang yang datang setiap minggu pada hari rabu dari pihak Mahadesa TDC. Oleh

karena itu, masih terdapat banyak nasabah/SPV yang sering melakukan keterlambatan pembayaran yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet. Berikut yang dilakukan oleh BUMDes Semangat Pemuda dalam menangani pemberian kredit :

- 1) Pertemuan dengan nasabah/SPV terkait pemantapan kinerja dan biasanya ditemani oleh staff Mahadesa TDC sekaligus melakukan kunjungan ke BUMDes Semangat Pemuda.

Pertemuan dengan SPV biasanya diadakan dalam rangka meningkatkan kinerja SPV atau agenda lain seperti mengkonfirmasi utang yang dimiliki SPV. Pertemuan ini kadangkala diinisiasi oleh pihak Mahadesa ataupun dari pihak BUMDes sendiri. Pertemuan ini juga biasanya selalu diikuti kunjungan dari Mahadesa, kunjungannya bisa berupa pemantauan kinerja staff di BUMDes, pemantapan kinerja SPV, ataupun melakukan konfirmasi dan cross cek utang yang diakui SPV dengan yang tercatat di Mahadesa.

- 2) Pemberian Surat Peringatan (SP)

Surat Peringatan ini diberikan secara bertahap kepada nasabah yang mengabaikan Surat Pemberitahuan yang diberikan sebelumnya. Dalam proses ini pihak penanggung jawab nasabah/SPV akan dipanggil untuk dipertemukan dengan pihak BUMDes kemudian akan membahas bagaimana pelunasan kredit yang dimiliki oleh nasabah. Tahap ini akan menjadi tahap akhir dalam penanganan masalah pelunasan kredit.

- 3) Melakukan Penagihan kepada Semua nasabah/SPV

Sebagai bentuk usaha mengurangi tingkat kredit macet yang terjadi di BUMDes Semangat Pemuda, BUMDes mendatangi rumah setiap nasabah/SPV untuk melakukan penagihan piutang. Piutang merupakan pendapatan utama dari kegiatan operasional BUMDes sehari-hari, dan tingkat piutang yang dimiliki oleh BUMDes Semangat Pemuda sangat tinggi, diikuti dengan tingkat penjualan yang tinggi juga. Tingkat piutang yang tinggi tersebut menyebabkan berbagai masalah, seperti kredit macet. Oleh karena itu ketua dan staff BUMDes melakukan penagihan kepada seluruh SPV yang tergabung dalam BUMDes Semangat Pemuda.

c) *Aktivitas Pengendalian (control activities)*

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan berupa tujuan pengendalian agar tidak ada risiko dalam perusahaan, misalnya BUMDes Semangat Pemuda harus mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan secara rinci setiap transaksi suatu entitas agar pengakuan pemberian kredit dari nasabah/SPV sesuai dengan pencatatan yang telah terkomputerisasi. Mengenai aktifitas pengendalian untuk pengecekan independen dan menguji kesesuaian penagihan piutang jatuh tempo tersebut penulis menemukan beberapa masalah yang ada dilapangan, diantaranya :

- 1) Ketidakcocokan pengakuan utang warga SPV dengan data utang yang tercatat di Mahadesa

Pada saat melakukan penagihan keseluruhan nasabah/SPV, masalah pertama yang sering dihadapi ialah ketidakcocokan pengakuan utang SPV dengan data yang diberikan oleh Mahadesa. Data utang yang tercatat di Mahadesa menunjukkan utang yang sangat tinggi, setelah ditelusuri ternyata data yang ada di Mahadesa masih belum diperbarui dikarenakan operator yang seharusnya melakukan pembayaran terhadap belanjaan yang sudah lunas belum melakukan input pembayaran, sehingga utang yang sudah lunas menurut SPV masih tercatat di Mahadesa.

- 2) Pencatatan SPV mengenai utang tidak lengkap dan akurat, karena mengandalkan struk belanjaan dan ingatan

Beberapa nasabah/SPV tidak mengetahui cara pembukuan yang benar, mereka hanya mengandalkan struk yang diberikan oleh Bumdes Semangat Pemuda, sehingga apabila struk tersebut rusak atau hilang mereka tidak memiliki data lain sebagai bukti, selain itu juga kebanyakan SPV mengandalkan ingatan mereka untuk melakukan penagihan kepada warga mereka, sehingga tidak akurat utang yang tertagih. Namun ada juga SPV yang melakukan pembukuan dengan baik.

- 3) Terdapat nama orang lain di daftar nama nasabah/SPV

Sistem keuangan yang digunakan oleh BUMDes Semangat Pemuda dirancang sendiri oleh pihak Mahadesa, sehingga kekurangan yang dimiliki oleh sistem ialah total belanjaan yang bisa diinput harus lebih dari sama dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga apabila total belanja yang dilakukan oleh SPV

kurang dari Rp300.000 maka belanjaan tersebut tidak bisa diinput. Operator sistem yang bekerja di BUMDes Semangat Pemuda mengakalnya dengan menginput belanjaan yang totalnya kurang dari Rp300.000 tersebut ke dalam belanjaan SPV lain dengan kondisi yang sama, sehingga belanjaan yang kurang dari Rp300.000 tadi bisa tetap diinput didalam sistem. Akan tetapi dampak dari tindakan tersebut, belanjaan yang kurang dari Rp300.000 tadi tercampur ke dalam belanjaan SPV lain, akibatnya pencatatan di sistem kurang akurat, sehingga data utang yang ada di sistem setelah di cetak tidak sesuai dengan pengakuan SPV, artinya di pencatatan utang Mahadesa ada nama orang lain (yang bukan anggota warga SPV yang seharusnya) dan nama orang lain tersebut tidak diakui oleh SPV yang ditumpangi namanya. Itulah mengapa terdapat nama orang lain di daftar nama warga SPV dan itu sulit untuk dideteksi karena operator yang menginput belanjaan tersebut sering sakit dan jarang masuk kerja di BUMDes Semangat Pemuda. SPV yang ditumpangi namanya yaitu SPV Roahini, Lindawati, Heni, Sahni, an Sri Langgawati.

d) Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Informasi komunikasi dalam sistem pengendalian internal baik dalam lingkungan pengendalian merupakan hasil dari penilaian risiko, prosedur pengendalian dan pemantauan. Informasi harus disesuaikan, diproses, dan dikomunikasikan ke semua staf/karyawan BUMDes sehingga setiap orang dalam suatu entitas dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Untuk memberikan informasi dan komunikasi yang baik BUMDes Semangat Pemuda tidak melakukannya secara jelas dan terinci melalui kriteria calon nasabah/SPV dalam pemberian kredit, seperti :

Bagi nasabah/SPV yang akan melakukan kredit :

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga

Bagi BUMDes sendiri dokumen yang dibutuhkan terkait pemberian kredit adalah :

- 1) Bukti pengeluaran kas
- 2) Bukti penerimaan kas
- 3) Jurnal pengeluaran kas
- 4) Jurnal penerimaan kas

- 5) Buku besar
- 6) Buku/catatan nasabah/SPV

Dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan kredit diarsipkan dengan sistematis dan sesuai dengan pencatatan yang terkomputerisasi dengan baik. Nantinya dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

e) Pemantauan(*monitoring*)

Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern dalam BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri sasak apakah sistem yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan RAT. Pemantauan di BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak dilakukan oleh Direktur sebagai pemimpin, . pemantauan dilakukan secara berkala khususnya pada kebijakan pengelolaan keredi misalnya, setiap bulannya dilakukan pengecekan untuk melakukan pencocokan antar kondisi fisik dengan catatan akuntansinya. Selain itu, melakukan pengawasan dan evaluasi dan perkembangan.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BUMDes Semangat Pemuda yang ada di Desa Giri Sasak, peneliti menyimpulkan beberapa hal bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BUMDes Semangat Pemuda terkait pemberian kredit masih belum memadai atau masih terdapat kekurangan dilihat dari salah analisa kredit dan bangkrut. Sehingga upaya yang dilakukan adalah tagih terus. Namun perlu beberapa evaluasi agar sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif. Berdasarkan 5 komponen pengendalian internal, lingkungan pengendalian yang diterapkan sudah sesuai prosedur dan perundang-undangan meskipun penerapan pada karyawan masih kurang maksimal. Dalam penilaian risiko, BUMDes Giri Sasak masih belum memikirkan bagaimana mengelola risiko kredit dengan mencoba meminimalkan risiko kredit serta melakukan penanganan apabila terjadi kredit macet. Selanjutnya, aktivitas pengendalian dilakukan oleh seluruh staf BUMDes Semangat Pemuda namun beberapa staf BUMDes bisa dikatakan sering absen dengan alasan sakit sehingga mempengaruhi faktor terjadinya kredit macet. Kebijakan serta prosedur pemberian kredit juga terbilang kurang baik dilihat dari kurang ketatnya dalam menyelektif prosedur dalam meneliti dan

menyeleksi calon nasabah/SPV. Selanjutnya, informasi dan komunikasi yang dilakukan cukup baik dilihat dari penyimpanan serta pengarsipan dilakukan secara komputersasi, namun BUMDes Semangat Pemuda terdapat ketidakcocokan pengakuan utang warga SPV dengan data utang yang tercatat di Mahadesa. Dan terakhir pemantauan dilakukan pertemuan dengan nasabah/SPV terkait pemantapan kinerja dan biasanya ditemani oleh staff Mahadesa TDC sekaligus melakukan kunjungan ke BUMDes Semangat Pemuda.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pada informan masih belum menguasai dalam menjawab pertanyaan terkait pertanyaan dari peneliti tentang bagaimana keadaan yang terjadi di BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak. diketahui bahwa warga Desa Giri Sasak minimnya tenaga pendidikan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran, **pertama**, pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan harus dimaksimalkan oleh seluruh staf BUMDes. Perlu diadakannya pengawasan dan evaluasi oleh pemimpin/Direktur BUMDes atas ketaatan semua staf pada masing-masing tugasnya. Meskipun terdapat peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya apabila pelaksanaannya masih belum maksimal dijalankan maka hal tersebut dapat menghambat tercapinya tujuan perusahaan dan dapat mengganggu kinerja yang telah diterapkan oleh BUMDes Semangat Pemuda. **Kedua**, selalu meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada calon nasabah/SPV serta meningkatkan sistem pengendalian intern agar tidak terjadi kerugian yang dialami oleh BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak. **Ketiga**, pihak BUMDes harus lebih sering memonitor atau melakukan pertemuan kepada semua nasabah/SPV agar nasabah merasa terawasi dan tidak menyepelekan angsuran yang wajib dikembalikan. Pihak BUMDes harus melakukan tindakan penanganan lebih lanjut apabila terjadi kredit total.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijayanti, K. (2016). *Pengendalian Intern Dalam Proses Pemberian Kredit Pada Bpr Nusamba Ngunut – Cabang Ngadiluwih*. 1–19.
- Hanif. (2012). *Urgensi sistem pengendalian intern bagi instansi pemerintah*. 2.
- Maruta, H. (2015). *Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi*. 16–28.
- Mawardiani, A. F. (2017). *Studi Hermeneutika Pengendalian Intern Pemberian Kredit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. 17(2), 75–92.
- Mendari, W. E., & Widayati, R. (2019). *Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang*. 1–12.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/ewm65>
- Moellar, R. R. (2014). Executive's Guide To Coso Internal Controls Understanding And Implementing The New Framework (Vol. 148). John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. In (Vol. 59).
- Munawaroh. (2011). *Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri)*.
- Muzamil, M. (2014). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Pada BRI Kota Samarinda. *Jurnal EMBA*, 1(3), 680–690.
- Nurmala. (2015). *Analisa Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Griya BNI Pada BNI LNC Palembang*. 40–50.
- PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. (2005). *Bulletin Des Sociétés Chimiques Belges*, 53(March), 25–27.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. (2004). Dpr.
<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (2014). ACM International Conference Proceeding Series. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998*. (1998).
- UU RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan*. (1998). Bank Indonesia.
- Wahjusaputri, T. A. & S. (2018). *Bank & Lembaga Keuangan*.